

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisa Usabilitas Sistem Deteksi Akses Pornografi Pengguna Internet Menggunakan Metode McCall” menjelaskan bahwa pengujian perangkat lunak adalah suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi ketepatan, kelengkapan dan mutu dari perangkat lunak. Pada penelitian ini menghasilkan secara keseluruhan bahwa Sistem Deteksi Pornografi Pengguna Internet ini sudah memiliki kualitas yang baik berdasarkan teori kualitas McCall, pada matrik terbaik, yaitu *usability* menghasilkan hasil sebesar 80% dan matrik terburuk, yaitu *reliability* menghasilkan hasil sebesar 51,98% (Sugiantoro & Mustakim, 2017).

Aplikasi INLIS pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat digunakan untuk mengelola proses peminjaman serta pengembalian buku yang dilakukan oleh setiap anggota pustaka. Dengan sistem perpustakaan tersebut dapat membantu para pustakawan untuk mengetahui arus keluar-masuk buku serta keterlambatan pengembalian yang dilakukan anggota pustaka untuk menentukan denda yang harus dibayar oleh anggota.

Dengan adanya aplikasi INLIS sebagai Sistem Informasi Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, penulis akan melakukan pengukuran kualitas Sistem Informasi Perpustakaan karena pada sistem ini belum diketahui tingkat kualitas sistemnya.

Metode McCall merupakan metode pengujian perangkat lunak yang memiliki kriteria pengukuran paling lengkap dengan lima faktor kualitas yang meliputi *correctness, usability, reliability, integrity, dan efficiency*. ”Pengukuran kualitas Sistem Informasi Perpustakaan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kondisi dari sistem tersebut. Apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau perlu dilakukan peningkatan terhadap sistem tersebut (Khairullah, Soedijono, & Fatta, 2017).

Dengan mengukur kualitas Sistem Informasi Perpustakaan ini, diharapkan dapat membantu pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terhadap sistem untuk menindaklanjuti kualitas sistem. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul penelitian **“PENGUKURAN KUALITAS APLIKASI INLIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE MC-CALL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan penerapan metode McCall ini dapat membantu pengguna dalam penilaian kualitas Sistem Informasi Perpustakaan Aplikasi INLIS?
2. Apakah dengan mengukur kualitas sistem pada Aplikasi INLIS dengan menggunakan metode McCall dapat menentukan kualitas sistem?
3. Apakah menggunakan metode McCall dengan menetapkan Indikator penilaiannya dapat membantu dalam pengukuran kualitas Aplikasi INLIS?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka di dapat hipotesa sebagai berikut :

1. Dengan menerapkan metode McCall diharapkan dapat membantu pengguna dalam penilaian kualitas Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan Aplikasi INLIS.
2. Dengan menerapkan metode McCall diharapkan dapat mengukur kualitas Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan Aplikasi INLIS.
3. Dengan menggunakan metode McCall dan menetapkan Indikator penilaiannya diharapkan dapat membantu dalam pengukuran kualitas Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan Aplikasi INLIS.

1.4 Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga tidak terlalu luas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka penulis membatasi pembahasan masalah, yaitu :

1. Penyajian penilaian pengguna terhadap kualitas Aplikasi INLIS.
2. Hasil pengukuran kualitas dengan menggunakan Metode McCall.
3. Mengukur kualitas *Product Operations*.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Merancang aplikasi pengukuran kualitas Sistem Informasi Perpustakaan dengan menggunakan metode McCall dan bahasa pemrograman Visual Basic
2. Menguji metode McCall dengan aplikasi pengukuran kualitas Sistem Informasi Perpustakaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, serta sebagai bahan acuan dalam pengukuran kualitas sistem selanjutnya.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dengan dilakukannya pengukuran kualitas sistem, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki data yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan peningkatan sistem.
3. Pihak lain, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian serupa.

1.7 Tinjauan Umum Instansi

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah instansi pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan di daerah ini. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 pada 21 Juli 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Povinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah tersebut keluar menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Keberadaan dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dilepas dari Lembaga Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan yang ada di Sumatera Barat. Sebelumnya dua lembaga ini merupakan dua lembaga yang disatukan menjadi satu akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah yang tersebut diatas yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007.

1.7.1 Sejarah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Lembaga Perpustakaan diawali dengan berdirinya Perpustakaan Negara. Pendiannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI nomor 21091/S, tanggal 10 April 1956. Pendirian Perpustakaan ini merupakan satu proyek untuk Indonesia Bagian Barat, berkedudukan di Bukittinggi sebagai ibukota Provinsi Sumatera Tengah.

Mulai berdiri, Kepala Perpustakaan Negara dijabat Ismail Daulay hingga 1958 dan dilanjutkan oleh M. Thaher Shah Sri Maradjo. M. Thaher menjadi kepala Perpustakaan cukup lama hingga 1981. Kemudian diteruskan oleh Drs. Rozali Said yang menjabat sampai 1986.

Pada 1962, Perpustakaan Negara dipindahkan ke Padang dan menempati gedung Societit Onebeneon berganti nama Wisma Pancasila. Kemudian pindah ke

Gedung Bagindo Azis Chan, dekat kantor pos (balai pemuda). Pada 1967, menempati gedung baru di Jalan Sudirman Nomor 52 Padang.

Perpustakaan Negara berganti nama menjadi Perpustakaan Wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdikbud pada 1979. Perubahan nama ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya RI Nomor 095/0/1979 tanggal 29 Mei 1979. Untuk Sumatera Barat, termasuk tipe A karena koleksi bukunya diatas 10.000 eks.

Pada 19 Maret 1987, pindah ke Jalan Diponegoro Nomor 4 Padang, dengan menempati gedung baru yang memiliki luas tanah 2.378 meter². Peresmiannya dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Fuad Hasan. Kepala Perpustakaan Daerah saat pemindahan ini dijabat Drs. Zainuddin Kamal yang bertugas mulai 1986 hingga 1995. Gedung bertingkat tiga ini, akhirnya ambruk dan rata dengan tanah akibat gempa dahsyat 30 September 2009.

Saat ini Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat mempunyai dua tempat pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran yaitu di kawasan GOR Haji Agus Salim Jalan Asahan No. 3 Padang, tepatnya di depan Kantor Samsat Padang untuk pelayanan perpustakaan.

Sebelum pindah ke kawasan GOR Haji Agus Salim Jalan Asahan sini, pascaambruknya gedung lama di Jalan Diponegoro No. 4 Padang akibat gempa besar tanggal 30 September 2009, layanan perpustakaan sempat dipindahkan di kawasan Tabing, bersebelahan dengan Kantor PDAM di Kecamatan Padang Utara. Sedangkan di lokasi gedung lama yang ambruk itu, kini sedang dibangun gedung bertingkat 3,5 lantai dan akan dimanfaatkan sebagai gedung perpustakaan dengan pelayanan yang lebih representatif.

Satu lagi di Jalan Pramuka V Nomor 2 Khatib Sulaiman Padang. Kantor ini awalnya adalah kantor Badan Kearsipan Sumatera Barat. Kantor ini sementara dijadikan sebagai pusat kegiatan dan operasional lembaga yang sudah bergabung ini menjelang selesainya bangunan baru di Jalan Diponegoro No.4 Padang. Mulai dari kepala badan, sekretaris dan mayoritas kepala bidang serta jajaran staf berkantor di sini.

1.7.2 Visi, Misi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Visi dan Misi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Visi :

"Menjadikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Sumber Informasi dengan Membangun Masyarakat yang Sadar Arsip dan Gemar Membaca untuk Mencerdaskan Masyarakat"

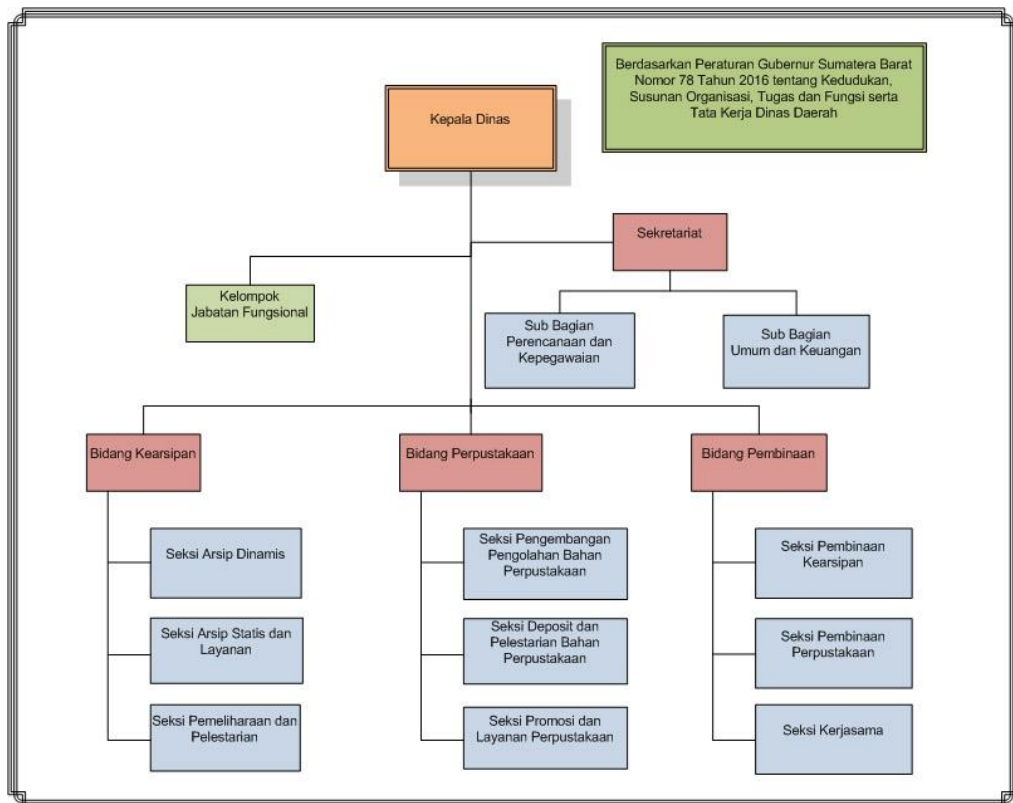
Misi :

1. Mengembangkan Budaya Gemar Membaca;
2. Mengembangkan dan Melestarikan Bahan Pustaka;
3. Mendayagunakan dan Mengembangkan Semua Jenis Perpustakaan;
4. Meningkatkan Penyelamatan, Pelestarian dan Pemanfaatan Arsip;
5. Meningkatkan dan Mengembangkan SDM, Sistem dan Kelembagaan Kearsipan dan Perpustakaan;
6. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengawasan Arsip.

1.7.3 Struktur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masingnya berlangsung seperti yang diharapkan sehingga tujuan dapat tercapai. Jadi, organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya hubungan yang harmonis antara sesama karyawan.

Adapun struktur organisasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan seperti terlihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

1.7.4 Tupoksi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai :

Tugas pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kearsipan dan perpustakaan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya